

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL KALIMANTAN BARAT

Walhi Kalimantan Barat – AMAN Kalimantan Barat – Institut Dayakologi – Elpagar – Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) – LBH Angsana – Lembah – Link-AR Borneo

Alamat: Jalan H.M. Husni Thamrin Blok P. 41 Pontianak – Kalimantan Barat, 78124

Pontianak, 18 Oktober 2024

Pontianak, 18 October 2024

Perihal: ***Keberatan dan Penolakan Proposal GIZ***

Subject: **Concern and objection to the FP248 Land-based Mitigation and Adaptation through a Jurisdictional Approach in West Kalimantan proposed by GIZ**

Kepada Yth. **GCF Board Co-Chairs, GCF Board Members**
at the 40th GCF Board Meeting
in Songdo.

Dear **GCF Co-Chairs, GCF Board Members**
at the 40th GCF Board Meeting
in Songdo.

Melalui surat bersama ini, kami yang terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut yakni Walhi Kalimantan Barat, AMAN Kalimantan Barat, Institut Dayakologi, Elpagar, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), LBH Angsana, Lembah dan Link-AR Borneo merasa prihatin atas proposal yang dipersiapkan dan disampaikan oleh GIZ kepada pihak GCF dengan dasar pertimbangan permasalahan sebagai berikut;

Through this joint letter, we, the following NGOs in West Kalimantan, namely Walhi West Kalimantan, AMAN West Kalimantan, Institut Dayakologi, Elpagar, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), LBH Angsana, Lembah, and Link-AR Borneo, are concerned about the Project Proposal prepared and submitted by GIZ to the 40th GCF Board Meeting in Songdo on 21-24 October 2024 based on the following deliberation:

Pertama, bahwa melalui proposal yang diajukan pihak GIZ justeru mendorong perluasan ekspansi bisnis sawit dan rantai pasoknya dengan semakin membuka ruang untuk pembukaan hutan/lahan di wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). Hal ini kami nilai bertentangan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diniatkan untuk dilakukan pada wilayah MAKL di Kalimantan Barat terutama pada lima wilayah target implementasi proposal.

First, GIZ encourages expanding the palm oil business and its supply chain through the Project Proposal by increasing the forest/land clearing space. We consider this contrary to climate change mitigation and adaptation efforts in the West Kalimantan Indigenous Peoples and Local Communities (IPLC) territories in the five target areas for the Proposal implementation.

Kedua, bahwa dorongan GIZ agar masyarakat adat dan komunitas lokal mendapatkan hak penggunaan lahan dalam rencana implementasi program yang diusulkan justru bertentangan dengan hakikat keberadaan MAKL yang mestinya diperkuat haknya atas lahan turun temurun. Sebab hak penggunaan lahan justru memosisikan MAKL berada pada tempat yang lemah sekaligus menegasikan

Second, GIZ supports Indigenous peoples and local communities in obtaining land use rights in the proposed project implementation plan, which contradicts the nature of IPLCs. Instead of strengthening their customary land rights, the land use rights scheme puts IPLCs in a weak position and negates their customary rights since it is about borrowing and using the living space and tenure they have controlled for

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL KALIMANTAN BARAT

Walhi Kalimantan Barat – AMAN Kalimantan Barat – Institut Dayakologi – Elpagar – Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) – LBH Angsana – Lembah – Link-AR Borneo

Alamat: Jalan H.M. Husni Thamrin Blok P. 41 Pontianak – Kalimantan Barat, 78124

mereka, dimana seolah MAKL melakukan pinjam pakai atas ruang hidup dan wilayah kelola yang dikuasainya secara turun temurun. MAKL tidak ditempatkan sebagai sentral pengakuan maupun perlindungan hak-hak mereka selaku pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat lebih atas rencana proyek.

Ketiga, bahwa keberadaan GIZ melalui proyeknya terdahulu di Kalimantan Barat dalam kenyataannya berdasarkan penelusuran rekam jejaknya (*track record*) oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil sangat bermasalah di lapangan dan hingga saat ini belum terselesaikan (surat komplain organisasi masyarakat sipil 2018 terlampir).

Keempat, bahwa dalam proses penyusunan proposal yang dilakukan pihak GIZ yang ditujukan ke GCF mengesankan indikasi pencatutan nama sejumlah lembaga. Kami yang berasal dari sejumlah lembaga dimaksud yang disebutkan tidak pernah merasa terlibat maupun dilibatkan dalam penyusunan proposal GIZ. Selain itu proyek yang diusulkan GIZ dalam proposal berpotensi menimbulkan konflik antar CSO di Kalimantan Barat yang lembaga-lembaganya dicantumkan dalam proposal GIZ.

Atas dasar sejumlah poin di atas, maka dengan ini ***kami menyatakan tidak pernah dilibatkan, keberatan dan menolak keras*** cara pihak GIZ berikut proposal yang diajukan. Berharap agar saudara Ketua Dewan Direktur GCF mengambil langkah tegas untuk tidak menerima permohonan proposal yang diajukan pihak GIZ tersebut.

Demikian surat keberatan dan penolakan ini disampaikan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Besar harapan kami agar dapat menjadi pertimbangan serius pihak GCF agar cara-cara

generations. IPLCs are not placed at the centre for recognition or protection of their rights as parties who should receive the more significant portion of the benefits from the project proposal.

Third, the presence of GIZ with its previous projects in West Kalimantan is problematic. A complaint submitted to GIZ based on investigations of its track records by several CSOs in the field has not been resolved to date (a 2018 civil society organisations complaint letter is attached).

Fourth, in preparing the proposal by GIZ to GCF, there was an indication of misappropriation of the names of several organisations. We, who were mentioned in the project proposal, never felt involved or involved in preparing the GCF project proposal. In addition, the project proposed by GIZ could cause conflict between CSOs in West Kalimantan, whose organisations are listed in the GIZ proposal.

Based on the above points, we declare that we have never been involved, object to, and strongly reject the method used by GIZ and the submitted Project Proposal. We hope that the GCF Board Members will take firm steps not to approve the project proposal submitted by GIZ.

Thus, this letter of objection and rejection is submitted with full awareness without any coercion from any party. We greatly hope that it can be a serious consideration for the GCF so the

ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL KALIMANTAN BARAT

Walhi Kalimantan Barat – AMAN Kalimantan Barat – Institut Dayakologi – Elpagar – Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) – LBH Angsana – Lembah – Link-AR Borneo

Alamat: Jalan H.M. Husni Thamrin Blok P. 41 Pontianak – Kalimantan Barat, 78124

tidak baik seperti yang dilakukan pihak GIZ tidak terulang.

Thus, this letter of objection and rejection is submitted with full awareness without any coercion from any party. We greatly hope that it can be a serious consideration for GCF so that unacceptable methods by GIZ are not repeated.

Hormat kami,

Sincerely,


HENDRIKUS ADAM
Direktur Walhi Kalbar


TONO
Ketua AMAN Kalbar


KRIESSANDI GUNUI
Direktur Institut Dayakologi


FURBERTUS IPUR
Direktur Elpagar


NORMAN IWAN
Ketua LBH ANGSANA


TRIPONIA ERNY
Direktur LBBT


STEPANUS ROBIN
Direktur LemBAH


AHMAD SYUKRI
Ketua Link-AR Borneo

Tembusan:

1. GCF Board Members
2. GIZ Project Lead
3. Indonesia NDA to GCF
4. GCF Active Observers
5. Arsip

CC:

1. GCF Board Members
2. GIZ Project Lead
3. Indonesia NDA to GCF
4. GCF Active Observers
5. Archive